

**REKAPITULASI JUDUL TESIS****KONSENTRASI HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN****PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNTAG SEMARANG**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NPM</b>	<b>JUDUL TESIS</b>
<b>OKTOBER 2002</b>			
1	DRS. BUDIYANTO, S.H	0010130017	KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROP. JATENG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMDA (STUDI KASUS DI PROPINSI JAWA TENGAH)
2	EDI PRANOTO, S.H	0010130018	KEDUDUKAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)
<b>APRIL 2003</b>			
3	MICHAEL MOTE, S.H	0010130020	KAJIAN YURIDIS TENTANG OTONOMI KHUSUS PAPUA BERDASARKAN UU NO. 21 TAHUN 2001 DALAM RANGKA MENSEJAHTERAKAN RAKYAT
4	BENNY BAMBANG IRAWAN NITINEGORO, SH	0010130016	STUDI BANDING UU NO : 12 TAHUN 1964 DAN UU KETENAGAKERJAAN NO. 27 TAHUN 2003 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
5	HARJONO, S.H	0010130019	KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGELOLAAN JEMBATAN TIMBANG OLEH PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
6	PAUJAN, S.H	0010130022	PEMBINAAN PNS DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT.
7	SUDJARWOKO, S.H	0010130023	PENGAWASAN LEGISLATIF TERHADAP EKSEKUTIF DI PROPINSI
8	TEGUH WIJAYANTO, S.H	0010130025	KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK TERHADAP EKSISTENSI BEKAS TANAH DESA PERDIKAN KADILANGU DALAM KONTEKS NEGARA KESATUAN INDONESIA
9	GEMA PANCAWATI, S.H	0010230036	PENGISIAN JABATAN PADA DINAS PEMUKIMAN DAN TATA RUANG PROPINSI JAWA TENGAH DALAM OTONOMI DAERAH

10	RETNO MAWARINI SUKMARININGSIH, SH	0110130049	PERANAN DPRD DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BERWIBAWA MELALUI FUNGSI PENGAWASAN
<b>OKTOBER 2003</b>			
11	ALI MURTONO, S.H, S.Pd	0010230035	PELAKSANAAN OTONOMI DESA DALAM RANGKA MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT DESA
12	SUMARYANTO, S.H	0010230038	PERANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DAM KETERTIBAN MASYARAKAT KHUSUSNYA DI WILAYAH HUKUM POLRES PEKALONGAN
13	DWI HARYONO, S.H	0110130046	FUNGSI KELEMBAGAAN RUKUN TETANGGA (RT) DALAM MENGHIMPUN SWADAYA MASYARAKAT KELURAHAN
14	HARKAT PURWATMOKO SETYAWAN, S.H	0110130047	FUNGSI LURAH SEBAGAI APARAT PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
15	SARJUNO, S.H	0110130050	REHABILITASI WANITA TUNA SUSILA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI DALAM MASYARAKAT
16	SUKIDI, S.H	0110130052	PERANAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENINGKATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSINYA DENGAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
<b>APRIL 2004</b>			
17	MOELJADI, S.H	0010130021	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PENINGKATAN PRINSIP DEMOKRASI DI KABUPATEN WONOSOBO DAERAH
18	MAHMUDA PANCAWISMA FEBRIHARINI, S.H	0110130048	FUNGSI PEMDA DALAM MEREHABILITASI KORBAN NAPZA MELALUI LEMBAGA REHABILITASI PANTI PAMARDI PUTRA "MANDIRI"
19	AGUNG SUSILO, SH	0110230056	PENGAWASAN DPRD DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PERDA PROPINSI JAWA TENGAH NO. 15 TAHUN 2002
20	JOKO PANATAS, SH	0110230058	PENGAWASAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PATI
<b>OKTOBER 2004</b>			
21	HADI KARYONO, SH	0210130069	PELIMPAHAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA CAMAT DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH

22	ISMAIL H. FACHRUDDIN, SH	0210130070	PELAKSANAAN FUNGSI KEJAKSAAN DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BERSIH MELALUI PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME.
23	ISNANTO, SH	0210130071	FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK
<b>APRIL 2005</b>			
24	L. PRABAWA, SH	0210130072	TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT MELALUI KONSEP OTONOMI DAERAH MENURUT HUKUM POSITIF
25	UNTUNG DARMADI, SH	0210130073	PEROLEHAN HAK ATAS TANAH OLEH PEMERINTAH UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
26	BASOEKI WINOTO, SH	0210230092	FUNGSI PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM MELINDUNGI KESELAMATAN PEKERJA PADA INDUSTRI ROKOK DI KOTA SEMARANG
27	BUDI PRASETYO, SH	0210230093	FUNGSI NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI
28	SURAWI, SH	0210230094	FUNGSI BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
29	UNTUNG LEKSONO, SH	0210230095	FUNGSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
<b>NOPEMBER 2005</b>			
30	SUHARYANTO, S.H	0010130024	PEMBERDAYAAN ASAS SELF ASSESSMENT PADA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM USAHA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
31	SUBANDRIYO, S.H	0110130051	PENGAWASAN ADMINISTRATIF YANG DILAKUKAN OLEH DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
32	DRS. ABD. ROHMAN	0310130103	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1985 TENTANG PERLINDUNGAN ORMAS TERHADAP MEKANISME INFRASTRUKTUR POLITIK DI INDONESIA
33	AMRI PANAHTAN SIHOTANG, SS	0310130104	FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH

34	WAHYU NURHAYANI, SH	0310130106	FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
35	NGARBI, S.Sos	0310130108	FUNGSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BERWIBAWA
36	AGUS SALIM, SH	0310230119	FUNGSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENEGAKAN PERDA KOTA SEMARANG TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PASAR GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.
37	BAMBANG ADIONO, SH	0310230120	FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
38	HANGGORO PRABOWO, SH	0310230122	FUNGSI LEMBAGA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEADILAN.
39	HENDRO SUKMONO, SH	0310230123	PELAKSANAAN TUGAS KOMISI PEMILIHAN UMUM JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
40	DRS. HONO SEJATI, SH	0310230124	FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM MENANGANI MOGO MOGOK KERJA UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM . TERHADAP TENAGA KERJA.
41	RAS'ALI, SH	0310230127	PELAKSANAAN FUNGSI CAMAT DALAM MELAKSANAKAN PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
42	RINI RETNOWINARNI, SH	0310230128	PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR : 3 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI DI PROPINSI JAWA TENGAH.
43	SRI ANANINGSIH, SH	0310230130	PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT DI PEMERINTAH SEMARANG.
44	SOEGENG SOEJOTO, SIP	0310230131	KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG
45	SOEHADI , SIP	0310230132	PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH SEMARANG DALAM RANGKA MELINDUNGI KEPENTINGAN MASYARAKAT.
46	SUTIYONO, SH	0310230133	FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM PELAKSANAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

47	WIEKE HESTININGRUM, SH	0310230134	FUNGSI JAKSA SELAKU JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK
<b>APRIL 2006</b>			
48	BAMBANG WICAKSONO, SH	0310130107	KEDUDUKAN HUKUM INTERVENIENT DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM
49	CHRISTIANA NANY SETYARSIH, SH	0310210136	FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
50	DHIANA LUKMAWATI, SH	0310210137	KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN KOORDINASI PEMBANGUNAN KABUPATEN KOTA WILAYAH I TERHADAP PENGEMBANGAN POTENSI KABUPATEN / KOTA
51	HERU RIANDANI, SH	0310210140	PELAKSANAAN FUNGSI DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT MELALUI FUNGSI PELAYANAN
52	DRS. IMAM SYARIF YUDO WIBOWO	0310210141	PELAKSANAAN SISTEM PEMBINAAN PNS PADA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PATI DALAM RANGKA PENINGKATAN EFEKTIVITAS KERJA
53	MASKHUD, SH	0310210143	SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.
54	MULYANTO, SH	0310210144	FUNGSI PENGAWASAN PELAKSANAAN APBD DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT OLEH DPRD KAB. PATI (KASUS PEMERINTAHAN KABUPATEN PATI)
55	DRS. MUSTOFA KAMAL	0310210145	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA TANI SESUAI DENGAN INPRES NO. 2 TAHUN 2005 DI KABUPATEN PATI
56	EDY SUJATMIKO, S.Sos, MM	0310230153	PELAKSANAAN OTONOMI DESA DALAM RANGKA POLITIK DESENTRALISASI.
57	DRS. MUHAMMAD FADKURROZI	0310230154	PENGARUH PENEMPATAN PEGAWAI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
58	MUKAIM ADI WARDOYO, S.Sos	0310230157	FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERDA TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).
59	SHOLIHIN, SE	0310230161	FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DESA.

60	DRS. SULARJO	0310230165	PELAKSANAAN FUNGSI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DI KABUPATEN JEPARA.
61	SULASTRI, SH	0310230166	PELAKSANAAN PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.
<b>NOPEMBER 2006</b>			
62	LENIS KOGOYA, S.th	0310130105	PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI KHUSUS BAGI PROPINSI PAPUA UNTUK PERLINDUNGAN HUKUM WARGA MASYARAKAT
63	HERU PRIYONO, S.H	0410130186	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA TERHADAP PENINGKATAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN
64	DRS. ROMLI MUBAROK	0410130190	FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGHAPUSAN BENDA DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK.
65	BUDIANTO, S.H	0410230208	PELANGGARAN HUKUM DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA KOTA TEGAL
66	MUHAMAD DAHLAN YACOB, SIP	0410230209	PEMBINAAN GURU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DEMAK MENURUT HUKUM POSITIF
67	MOCH AMIRIN DJAZULI, S.H	0410230210	PENGELOLAAN BENDA DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN UMUM DI KOTA SEMARANG
68	MAFTUKAH, S.H	0410230214	PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERDA KABUPATEN KENDAL NO. 8 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PASAR DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH
69	MUJIYONO, S.H	0410230215	FUNGSI DIPENDA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KOTA SEMARANG.
70	SUWARNO, S.H.	0410230217	PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN RSUP DR. KARIADI SEMARANG DALAM PENINGKATAN PEMBERIAN PELAYANAN.
71	THERESIA AGNI SRI WIRYANTI, SH	0410230218	PELAKSANAAN PENGATURAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN NASIONAL.

<b>APRIL 2007</b>			
72	MUSLIM, SH	0310230126	FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGAWASAN TERHADAP DANA DEKONSENTRASI DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA
73	TINTIN MARIYANA, SH	0410130192	PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA MENINGKAT - KAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG.
74	ABU DHUFRON, SH	0410230207	PENGELOLAAN ZAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 38 TAHUN 1999 DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.
75	HARINI MUDIASTUTI, S.H.	0410230212	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 20 TAHUN 2003 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENYELENGGARAN PENDIDIKAN DI KOTA SEMARANG
76	HERRY FATHURACHMAN, SH	0410230213	PEMBAHARUAN SISTEM PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK.
77	DIDI HARYADI, SH	0510130243	PENGATURAN PELAKSANAAN TUGAS KPU SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2004 DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS DEMOKRASI.
78	SISWANTORO, SH	0510130246	PERBUATAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA BEKAS HAK BARAT UNTUK MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM.
79	WINDU SUNARDI, S.H	0410230219	PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ADMINISTRASI BELLE (PENCARI KEADILAN ADMINISTRASI)
80	ALI NURYAHYA, SH	0510130240	PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA
81	WIDIYATMOKO, SH	0410130193	PEMBINAAN PNS DINAS PERMUKIMAN DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MENINGKATKAN PRESTASI KERJA DAN KARIER.
82	ENDAR WINARTO, SH	0410230211	PELAKSANAAN FUNGSI CAMAT DALAM PELAYANAN MASYARAKAT DI ERA OTONOMI DAERAH
<b>OKTOBER 2007</b>			
83	ALI RIFAI, SH	0510130241	FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERWAKILAN DESA TERHADAP APARAT PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERSIH DAN BAIK.
84	DJOKO SURANTO, SH	0510130244	PERDA PENANGGULANGAN MASALAH WANITA TUNA SUSILA (WTS) DAN

			REHABILITASI WTS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KETERTIBAN DI DALAM MASYARAKAT.
85	RAHAYU DEWI. SH	0510130245	PELIMPAHAN WEWENANG DIBIDANG PERIJINAN TEMPAT USAHA DARI WALIKOTA KEPADA CAMAT DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PERIJINAN DI KOTA SEMARANG.
86	BONNYARTI KALA LANDE, SH	0511230247	PERADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI SARANA PENGAWASAN TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN
87	SRI HARTATI, S.H	0510230259	PELAKSANAAN HAK UJI KONSTITUSI OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM.
88	SUYONO, S.H.	0510230260	PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM BENDA CAGAR BUDAYA.
<b>APRIL 2008</b>			
89	BAMBANG SUCIPTO, S.H.	0610130273	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 6 TAHUN 1974 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
90	DJATMIKO IRIAN BUDIONO, SH	0610130274	PENGATURAN IZIN PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO DAN IMPLEMENTASINYA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMBERIAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT DALAM BIDANG INFORMASI ( KASUS DI
91	RETNO PANTJAINDAH WIJANI, SH	0610130277	PELAKSANAAN PERDA NOMOR : 12 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
92	ROSANDIONO BAMBANG SEJATI, SH	0610130278	PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERDA APBD DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH
93	WAROS, SH	0610130279	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1980 DAN PENGARUHNYA TERHADAP DISIPLIN PEGAWAI DI RSUP DR. KARIADI SEMARANG
94	BAMBANG SURYONO, S.H	0610110284	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA TERTIB KEPENDUDUKAN
95	BUDI SARYANTO GUMAWANG, SH	0610110285	PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 30 TAHUN 1980 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA PADA PEMERINTAH KANUPATEN BOYOLALI
96	HARI SUPARTOMO, S.H	0610110287	PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR : 12



			TAHUN 2007 TENTANG PAJAK REKLAME DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
97	JOKO MARDIYANTO, S.H	0610110289	PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BOYOLALI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DEMOKRASI
98	MULYANTO, S.IP	0610110290	TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BERWIBAWA
99	PURWADI, S.H	0610110291	EFEKTIFITAS PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
100	SRI MINDARYATI, S.H	0610110292	FUNGSI CAMAT BERDASARKAN HUKUM POSITIF DALAM RANGKA MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH YANG LUAS , NYATA DAN BERTANGGUNG JAWAB
101	SURATNO, S.H	0610110293	FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP ANGGARAN PEDAPATAN BELANJA DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BERWIBAWA.
102	EDI SUPRIYANTO, S.H	0611230298	FUNGSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BERSIH
<b>OKTOBER 2008</b>			
103	PANDJI KARTIKO, SH	0510230258	PROSES PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PP TENTANG APBD DI PROVINSI JAWA TENGAH
104	HENY HERLINA, SH	0610130281	PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR : III TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT SAMIN
105	SUDIKTO, SH	0610230312	PELAKSANAAN PERATURAN TENTANG PERPUSTAKAAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERBIT DAN PENGUSAHA KENA PAJAK
106	AGUS MURYANTO, SH	0610230314	IMPLEMENTASI UU. NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK BURUH ( DI WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
107	HARTONO, SH	0610230315	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MENARA DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK BIDANG TELEKOMUNIKASI PT. TELKOM INDONESIA Tbk. WILAYAH JATENG DAN DIY
108	ISKARNO, SH	0610230317	PENERAPAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NO. 37 TH. 2006 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RSJ DAERAH DR, AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG DALAM RANGKA

			MENINGKATKAN PELAYANAN UMUM OLEH RSJ DAERAH DR. AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG
109	NINING PUJIASTUTI, SH	0610230319	PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR : 4 TAHUN 2001 TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
110	ROCHMI ROCHIEH, SH	0610230320	PELAKSANAAN PERDA KOTA SEMARANG NOMOR : 17 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SEMARANG
111	SARWEDI, SH	0610230321	PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK DI KOTA SEMARANG
112	SUGI MARTONO, SH	0610230323	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR : 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN ANAK TERLANTAR OLEH DINAS SOSIAL PROPINSI JAWA TENGAH.
113	SUMANTO, SH	0611230324	PELAKSANAAN PENGAWASAN PENEBAANGAN KAYU LIAR DI KAWASAN HUTAN PROVINSI JAWA TENGAH BERDASARKAN PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU.
<b>APRIL 2009</b>			
114	ANDI NOOR KUSUMA, S.Sos, MM	0310230150	PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PENGELOLAAN BONDHO DESO DALAM PENYELENGGA--RAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN JEPARA
115	DHANI LARASATI, SH	0510230256	PELAKSANAAN FUNGSI PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEKERJA
116	ATENIUS MURIP, SH	0610130272	PROSES PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PAPUA
117	ISHAK SAMUEL RONSUMBRE, SH	0610130275	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA JAYAPURA
118	ABD. ALIM WICAKSONO, SH	0710130330	PELAKSANAAN TUGAS KPU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUNA MENUJU PENEGAKAN ASAS DEMOKRASI
119	AGUNG SATRIO PRAKOSA, SH	0710130330	PENGELOLAAN INDUSTRI PARIWISATA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PROVINSI JAWA TENGAH.
120	BAKRIS MARDOKO, SH	0710130332	PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEHIDUPAN YANG LAYAK BAGI MASYARAKAT

121	BUDI WIYONO, SH	0710130333	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA OLEH DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA
122	ENDAH DWI SETIORINI, SH	0710130334	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PENYANDANG CACAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PARA PENYANDANG CACAT FISIK
123	EKWAN PRIYANTO, SH	0710130335	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA
124	HELMI SUPRAPTO, ST	0710130337	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2003 DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA TENAGA KERJA
125	MARIA MAHARSI PRADOPOSARI, SH	0710130338	FUNGSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN OLEH BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEROLEHAN INFORMASI YANG BENAR
126	I. NENGAH WIRTA DARMAJANA, SH	0710130339	PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA DAN ATURAN PELAKSANAANNYA DALAM MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT DESA PAKRAMAN GUNA MENUNJANG INDUSTRI PARIWISATA
127	SUPARTONO, SH	0710130341	PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1994 TENTANG PENGAWASAN ORANG ASING DAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA KERJA DALAM NEGERI
128	DRS. TITIK WAHJUNINGSIH	0710130343	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PEMBERIAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
129	DRS. TOTOK HANDOKO HM	0710130344	PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1980 TENTANG PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI JAWA TENGAH
130	ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP, SH	0710130345	PEMBATASAN HAK PERMOHONAN KASASI SENGKETA TATA USAHA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN Keadilan Pihak Pencari Keadilan
131	DRS. SOLEKAN, SH	0710130346	PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM RANGKA MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN ANAK DIDIK DI KOTA SEMARANG.
132	FRENGKI LANDE, SKM	0710130347	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS DI PAPUA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN LAPANGAN PEKERJAAN (Studi Kasus di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel)

**OKTOBER 2009**

133	DRS. ABD. RASYID A	0710230348	PENETAPAN ITSBAT NIKAH OLEH PENGADILAN AGAMA DALAM RANGKA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM KEPADA PENCARI KEADILAN
134	IR. PURNOMO HADIUTOMO	0710230350	PELAKSANAAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI PERPARKIRAN MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
135	ADIE SISWOYO, SH	0710230354	FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WANITA PADA INDUSTRI AIR MINUM
136	MOCH. SONHAJI SUGIYATNO, SH	0710230359	FUNGSI PENGELOLAAN JEMBATAN TIMBANG OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PROPINSI JAWA TENGAH MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2001 DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.
137	BUDI PURNOMO, SH	0710230364	FUNGSI PEMERINTAH KOTA DALAM MENGELOLA PERPARKIRAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.
138	DRA. CICIK SRI WURYANI	0710230370	FUNGSI DINAS SOSIAL PROPINSI JAWA TENGAH DALAM UPAYA PENINGKATAN KETRAMPILAN BAGI ANAK JALANAN.
139	HARNI SARWATI, SH	0710230371	FUNGSI DINAS SOSIAL PROVINSI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA LANJUT USIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN USIA LANJUT
140	DRA. HERININGTYAS WARA MARHENI	0710230372	PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PENGANGKATAN ANAK DALAM RANGKA PENGAWASAN TERHADAP ANAK ANGKAT.
141	TINA SURYANI RAHARDJO, SH	0710230374	FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG DALAM PENGELOLAAN INDUSTRI PARIWISATA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
142	SUKIYADI, SH	0710230379	PENGELOLAAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2002 DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH JATENG
143	SRI YATI, SH	0710230380	PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
144	YUSADAR ARMUNANTO, SH	0710230384	PELAKSANAAN FUNGSI DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA.

145	HELEN FAJARWATI, SH	0710230387	FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
<b>APRIL 2010</b>			
146	DRS. NURSAM KHOLIL	0710230355	OPTIMALISASI TUGAS POKOK CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN.
147	Rr. DIAN INDRIASARI, SH	0810120392	PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KENDAL.
148	IDA AYU EVI HANDAYANI, SH	0810130399	FUNGSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN SIARAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2005 DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA (STUDI DI RRI SMG)
149	LAMIDIN, SH	0810130400	PENGADAAN BARANG/JASA DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TENGAH BERDASARKAN KEPPRES NOMOR 80 TAHUN 2003
150	MULHARYANTA, SH	0810130401	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK OLEH DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM UPAYA MEREHABILITASI SOSIAL ANAK NAKAL.
151	SUMADI, A.KS	0810130402	PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL RI NO. 20/HUK/1999 DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETRAMPILAN TERHADAP BEKAS WANITA TUNA SUSILA OLEH DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH
152	SANTOSO, SH	0810130403	PELAKSANAAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NARAPIDANA ANAK SELAMA MENJALANI HUKUMAN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN
153	SHOLIKHIN, S.Pd	0810130410	PERLINDUNGAN HUKUM FOLKLOR MEBEL UKIR JEPARA DALAM PERSPEKTIF HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
<b>OKTOBER 2010</b>			
154	BURHANUDIN MUSTOFA, SH	0810230428	PEMBATASAN UPAYA HUKUM KASASI SENGKETA TATA USAHA NEGARA TERTENTU SEBAGAI SARANA MENUJU KEPASTIAN HUKUM
155	BUDI YUDI SUSETYO, SH	0810230429	PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS BINA MARGA DALAM PEMBANGUNAN DAN KOORDINASI PEMBINAAN JALAN DAN JEMBATAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH.
156	I GDE SUARDIYASA, SM, S.Pd	0810230431	PEMBENTUKAN PERWIRA ANGKATAN DARAT BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT NOMOR : KEP/19/IV/2005 TENTANG

			ORGANISASI DAN TUGAS AKADEMI MILITER TNI ANGKATAN DARAT PADA AKADEMI MILITER MAGELANG.
157	MOCH. IMRON, SH	0810230432	PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KPU KOTA SEMARANG DALAM PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2010 DALAM MEWUJUDKAN ASAS-ASAS DEMOKRASI.
158	OENOEEN PRATIWI, SH	0810230433	ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA MENGENAI PEMBERHENTIAN KEPALA DESA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR : 84/G/2006/PTUN.SMG DAN NOMOR : 76/G/2009/PTUN.SMG).
159	RENY JULIJANTI, SH	0810230434	PERANAN SERIKAT PEKERJA DALAM MEWUJUDKA KETENANGAN BEKERJA DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA.
160	UMI KHOLIFAH, SH	0810230439	PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA OUTSOURCING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
161	VIVID JAYANTI, SH	0810230440	PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KOTA SEMARANG.
<b>APRIL 2011</b>			
162	GUNUNG FAJAR, SE	0910130492	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERBITAN SIM MENUJU PELAYANAN PUBLIK YANG BERBASIS GOOD GOVERNANCE.
163	SAID PELU, SH	0910130493	PELAKSANAAN KEPMENTAMBEN NOMOR : 975K/47/MPE/1999 DALAM MEMBERIKAN KOMPENSASI TANAH YANG DIGUNAKAN SECARA TIDAK LANGSUNG UNTUK PEMBANGUNAN JARINGAN SUTET 500 KV
164	SULUH USADA ADI, SH	0910130495	PENINGKATAN PROFESIONALISME DI LEMBAGA AKADEMI MILITER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI
165	SUPARYANA, SH	0910130496	PENGAWASAN OLEH DPRD MAGELANG TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAGELANG
166	YAPET MAGAI, SH	0910130497	EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR : 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA KHUSUSNYA PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN NABIRE
167	YULIANTO, S.Sos	0910130498	PEMBATASAN HAK POLITIK TNI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK [ KAJIAN YURIDIS TERHADAP UU PEMILU DAN TNI ]
168	HENNY SISWIDYANINGSIH, SH	0910130508	PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT BERDASARKAN KEPMENPAN

			NOMOR : KEP/46/M.PAN/4/2004 TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
169	RISTY ASTUTI, SH	0910130511	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN DALAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
170	YUNI HARTATIK, SH	0910130536	PENGELOLAAN RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR : 5 TAHUN 1994 DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN GROBOGAN.
<b>OKTOBER 2011</b>			
171	SANDY SULARSO,SH	0010230037	PELAKSANAANKEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 561.4/69/2010 TENTANG UPAH MINIMUM DI KOTA SEMARANG DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN KEPADA PEKERJA.
172	DRS. FAID RIYADI	0910230577	IMPLEMENTASI PERDA DAN RETRIBUSI PARKIR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG
173	ELISA JUWONO, SH, S.PSI	0910230578	PENGAWASAN DPRD TERHADAP PAJAK REKLAME BERDASARKAN PERATURAN NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK REKLAME JO PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SEMARANG
174	TRI DJOKO JUWONO	0910230579	PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA TRANSMIGRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2009 DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA TENTANG KETRANSMIGRASIAN
175	DRS. ZENO GEBYAR KRISTIYANTO	0910230581	PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERSIH DI KABUPATEN GROBOGAN.
<b>APRIL 2012</b>			
176	ARIS SUKRISNO, SE	1010110598	DAMPAK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN DEMOKRASI DI KABUPATEN PATI
177	IRIANTO BUDI UTOMO, SH	1010110604	DAMPAK PUTUSAN MKRI NOMOR 82/PHPU.D.IX/2011 TERHADAP PELAKSANAAN PEMILUKADA ULANG DI KABUPATEN PATI
178	MAT SOLEH, SH	1010110605	PERANAN PARTAI POLITIK DALAM REKRUITMEN KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH (Studi Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Pati)
179	SAMINTO, SH	1010110607	IMPLIKASI PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA DESA TERHADAP KESADARAN POLITIK MASYARAKAT DESA SAMPOK KECAMATAN GUNUNG WUNGKAL, KABUPATEN PATI

180	ACHMAD MUNTOLIB, SH	1010130633	PENERBITAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG USAHA PERIKANAN DI PROVINSI JAWA TENGAH.
181	ALI ROZIKIN, SH	1010130634	PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OLEH DPRD TERHADAP APBD DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BERSIH DI KABUPATEN KENDAL
182	BAMBANG PURWANTO, SH	1010130636	PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2001 DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM NELAYAN DAN PETANI IKAN DI RAWAPENING.
183	DAUD PUJIYANTO, STH	1010130637	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG BESAR FARMASI DALAM PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1148/MENKES/PER/VI/2011 TENTANG PEDAGANG BESAR FARMASI
184	MARIDJO, SH	1010130640	PENGAWASAN RETRIBUSI PASAR BERDASARKAN PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SEMARANG.
185	ROMELAN, SH	1010130642	IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM FEDERASI SERIKAT BURUH INDEPENDEN DALAM PENANGANAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP ANGGOTANYA DI KOTA SEMARANG.
186	RUBIYANTO, SH	1010130643	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KETERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SEMARANG.
187	SETYOBUDI, SH	1010130644	PELAKSANAAN ASAS DOMINUS LITIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA OLEH PERADILAN TATA USAHA NEGARA.
188	SRI WANINGSIH, SH	1010130645	IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIK) DALAM PENINGKATAN PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Demak).
189	TUHUNINGSIH, SH	1010130647	KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN ANGGARAN 2011 DALAM PEMBIAYAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH
190	UBAIDILLAH, S.Ag	1010130648	EFEKTIFITAS MUSRENBANG (MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN) SEBAGAI UPAYA PEMERATAAN DAN PENENTU ARAH PEMBANGUNAN.
191	H. MUDASIR, SH	1010110657	PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MEMBANGUN PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DI KABUPATEN PATI ( Studi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik).
<b>OKTOBER 2012</b>			
192	TAMAT SISWO WARDOYO, SH	1010110608	PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG



			DESA TERKAIT DENGAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI
193	HARJONO PAMUNGKAS PUTRO,SH	1010230698	PELAKSANAAN FUNGSI LEMBAGA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SETELAH LEPAS DARI ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA GUNA MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.
<b>APRIL 2013</b>			
194	EDDY NURJONO, SH	1010230696	PERLINDUNGAN HUKUM PENCARI KEADILAN TERHADAP EKSEKUSI DI-PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.
195	KUSUMA FIRDAUS, SH	1010230699	UPAYA PEMBATASAN KASASI PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA ( Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor : 182 K/TUN/2007, Putusan Nomor : 282K/TUN/2007 dan Putusan Nomor : 109/G/2006/PTUN-JKT).
196	ZULKARNAIN, SH	1010230703	KEBIJAKAN DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH DARI KORUPSI,KOLUSI DAN NEPOTISME.
197	NUR AFIF,SH	1110130747	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI PENGADILAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG.
198	DRS. SATRIYAN ABD. RAHMAN	1110130749	KEPUTUSAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN USIA DI BAWAH UMUR (Studi Analisis Terhadap Putusan Yang Sudah Punya Kekuatan Hukum Tetap di Pengadilan Agama IA Semarang).
<b>OKTOBER 2013</b>			
199	DUJAN KOGOYA, SH	1010230695	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KHUSUS NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS RAKYAT PAPUA DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN TERHADAP PASANGAN BAKAL CALON GUBERNUR DI PROVINSI PAPUA.
200	ANDI SETYAWAN, SH	1110130741	PERLINDUNGAN HUKUM ANAK TERHADAP HAK-HAK ANAK SEBAGAI PEKERJA DI PROVINSI JAWA TENGAH.
201	ARIYONO, SH	1110130743	SISTEM KERJA KONTRAK (PKWT) DAN ALIH DAYA / OUTSOURCING DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA.
202	ENDANG KUSUMANINGSIH, SH	1110130744	PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN DITINJAU DARI HUKUM KETENAGAKERJAAN KAITANNYA DENGAN KESEJAHTERAAN PEKERJA.
203	KUKUH BIROWO,SH	1110130745	TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TERHADAP KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENURUT

			UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008.
204	MOHAMAD FATONI ADIYANTO, SH	1110130746	PELAKSANAAN PENGAWASAN MATERI PENYIARAN TELEVISI OLEH KPID JAWA TENGAH.
205	KUSWARINI, SH	1110230796	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA / BURUH OUTSOURCING DI PT.JASA MARGA PERSEROTERBUKA CABANG SEMARANG.
206	WIDAYANTI, SH	1110230799	PROSES PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN BANGUNAN BERDASARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2009 DALAM MEWUJUDAN PEMERINTAH DAERAH YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
<b>APRIL 2014</b>			
207	Muhammad Khabibilah Zen, SH	1010230701	Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih dan Demokratis (Studi Kasus Diskresi Dalam Pemerintahan)
208	Afifur Rahman, SH	1110230795	Rekonstruksi Kedudukan Hukum Aparatur Desa
209	Siti Sopiatur, SH	1110230797	Pelayanan Terhadap Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011
210	Adhi Budhi Sulisty, SH	1210130856	Kewenangan Peradilan Administrasi Dalam Mengadili Sengketa Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota
211	Hadi Prasetyo Haryono, AKS	1210130857	Pengaruh Tunjangan Kinerja Terhadap Peningkatan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Balai Pemasayarakatan (BAPAS) Kelas I Semarang
212	Novi Setiarini, SE	1210130859	Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Perizinan Usaha Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kendal
213	Icek Baskoro, SH	1210110875	Peranan Eksekutif dan Legislatif Dalam Mewujudkan Good Governance Di Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Grobogan
214	Sri Asih Widiyastuti, SH	1210130905	Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima Di Kota Magelang
<b>OKTOBER 2014</b>			
215	Arfin Kuswandari, S.Sos	1210120838	Pelayanan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Tengah
216	Evy Hendranarita Sanyoto, SH	1210120843	Implementasi Reformasi Birokrasi Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Di Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah

217	Muh Tholifin, SH	1210130858	Problematika Perizinan Usaha Panti Pijat Tradisional dan Pencegahan Maraknya Panti Pijat Ilegal di Kota Semarang
218	Drs. Aska Sapta Putra	1210130879	Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pasar Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang
219	Abdul Salim Ganjur, S.Ag	1210230940	Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 84/G/TUN/2006.PTUN.SMG Tentang Pemberhentian Lurah Desa Yang Telah Habis Masa Jabatannya Di Wilayah Kabupaten Demak
220	Tony Prasetyo Juarisanto, ST	1210230943	Tinjauan Yuridis Terhadap Konstruksi Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) sebagai Kewenangan Diskresi Yang Tertulis
221	Lilieko Eko Poerwanto, SH	1210230971	Eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Peradilan Administrasi Dalam Mencegah Kesalahan Administrasi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Tata Usaha Negara
222	Drs. Budi Utomo	1210230975	Pelaksanaan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Provinsi Jawa Tengah
<b>APRIL 2015</b>			
223	Anita Dewi Nugraeni, SH	131003741010033	Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Meninggalkan Tugas Tanpa Izin Di Lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Tengah
224	Hak Denny Mim Shot Tanti, ST	131003741010037	Pelaksanaan Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Rumah Tempat Tinggal Di Kabupaten Grobogan
225	Khalimi, SE	131003741010038	Peran Bidang Profesi dan Pengamanan (BIDPROPAM) Polda Jateng Dalam Penegakan Disiplin Guna Mewujudkan Good and Clean Governance
<b>OKTOBER 2015</b>			
226	Widiati Dwi Winarni, SH	0610230325	Analisis Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Fiktif Negatif Berkaitan Dengan Pelayanan Publik
227	Danius Wenda S.Sos	1010230694	Pelaksanaan Pemerintahan Desa Dalam Rangka Desentralisasi Pemerintahan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi : Desa Mamiri, Distrik Makki, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua)
228	Martha Sari Wandoyo, SH	131003741010039	Peran Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah Dalam Harmonisasi Peraturan Daerah Di Kabupaten Grobogan
229	Agustiana Wahyuningsih, SH	131003741010101	Pengaturan Pasar Tradisional Dan Toko Modern Dalam Meningkatkan Ekonomi

			Kerakyatan Di Kota Semarang
230	Puji Raharjo, SH	131003741010106	Pemberian Bantuan Hukum Menurut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin
231	Siswandari Cahyaningtyas, SH	131003741010107	Revitalisasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah
232	Sucahyo Kuswirantomo, SH., S.Sos	131003741010108	Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Terhadap Industri - Industri Di Simongan
233	Tony Pulo, SH	131003741010128	Implementasi Pengawasan Penggunaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik (Good Government)
234	Haripahwati Seti Rahayu, SH	131003741010131	Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Di Unit Pelayanan Pendapatan Dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Di Kabupaten Kudus
235	Setiadjid, SH	131003741010136	Implementasi Program Reforma Agraria Terhadap Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Di Kota Semarang
<b>APRIL 2016</b>			
236	M. Aminullah, SH	131003741010021	Membangun Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Yang demokratis Di Indonesia
237	Agil Joko Sarjono, SH	141003741010167	Efektivitas Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terhadap Penyelesaian Kasus Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi Jawa Tengah
238	Ahsanut Taqwim, SH	141003741010168	Kebijakan Penetapan Tarif Dan Nilai Pabean Atas Pemberitahuan Impor Barang Oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (Studi Kasus PT. SS Semarang)
239	Dwi Gustianisari, SH	141003741010170	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Memperkuat Akses Layanan Dalam Penanganan Korban Kekerasan
240	Legiman, SH	141003741010174	Sanksi Administrasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
241	Milyan Risdyan Al A., SH	141003741010175	Penguatan Bea Cukai Secara Kelembagaan dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional

242	Muh. Amin, SH	141003741010176	Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penerapan Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, Biaya Ringan Di Lingkungan Pengadilan Agama Kendal
243	Nelson Uamang, SH	141003741010177	Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
244	Nunuk Firdaus, SH	141003741010178	Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Tengah
245	Rony Julistiono, SH	141003741010180	Asas Keterbukaan, Asas Kebijakan Dan Asas Perlindungan Atas pandangan Hidup Diterapkan Hakim Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
246	Sami'an, SH	141003741010181	Analisis Capaian kinerja OMBUDSMAN Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelesaian Laporan Pengaduan Terhadap Pelayanan Publik
247	Drs. Setya Adi Winarko, SH	141003741010183	Optimalisasi Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Semarang
248	Purwanti, SH	141003741010203	Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Terhadap Kepemilikan Akta kelahiran Menuju Tertib Administrasi Kependudukan
249	Agus Cahyono, SH	141003741010207	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pananggulangan Pekerja Anak Terhadap Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Anak
250	Sapta Hartana, SH	141003741010208	Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mengenai Ganti Rugi Dalam Sengketa Kepegawaiwan
<b>OKTOBER 2016</b>			
251	Istiadi, SH	141003741010231	Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Masalah Kependudukan Menuju Tertib Administrasi Di Kota Semarang
252	Ngadirin, SH	141003741010233	Perlindungan Hukum Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung
253	Rohmad Pujiyanto, S.Kom	141003741010235	Pengelolaan Keuangan Desa Berwawasan Akuntabilitas Menuju Kesejahteraan Masyarakat
254	Slamet Supriyadi, SH	141003741010236	Implementasi Kewenangan Penegakan Peraturan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja

			Dalam Membina Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang
255	Suyanto, SH	141003741010237	Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Bidang Pembangunan Di Kota Semarang
256	Yos Budi Santoso, SH	141003741010262	Penyelesaian Permohonan Putusan Pengadilan Atas Dasar Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
<b>APRIL 2017</b>			
257	Kholimin, SH	131003741010074	Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Pemalang
258	Faizal Yudhi Nugroho, SH	131003741010102	Kewenangan Kepala Daerah Dalam Penegakan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kota Tegal
259	Edwin, SH	141003741010171	Wewenang PTUN Dalam Penetapan Dismissal Sebagai Penerapan Pasal 62 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
260	Drs. Imron Mastuti, SH	141003741010173	Reformasi Birokrasi Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Pengadilan Agama Salatiga
261	Agus Dwiyono, SH	151003741010291	Rekonstruksi Pembatasan Kasasi Terhadap Perkara Yang Objek Gugatannya Berupa Keputusan Pejabat Daerah Yang Jangkauan Keputusannya Berlaku Di Wilayah Daerah Yang Bersangkutan Di PTUN Semarang
262	Dony Eka Saputra, S.Kom	151003741010293	Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Memutus Sengketa Administrasi Pemilu
263	Haryono Widyastomo, SH	151003741010295	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten / Kota Sebagai Upaya Mencegah Executive Review
264	Rudi Agus, S.Sos	151003741010296	Peran Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Dalam Perlindungan Hukum Anak Jalanan
265	Sri Ambarwati, SH	151003741010297	Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Penetapan Pemenang Lelang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
266	Titik Ernawati, ST., SH	151003741010299	Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) Oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
267	YP Dwi Sri Setyowati, SH	151003741010300	Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Melalui Jalur Ajudikasi

			Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
268	Karyoso, SH	151003741010316	Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Wilayah Pemerintah Kota Semarang
<b>OKTOBER 2017</b>			
269	Atatin Malihah, S.Ag	131003741010034	Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Fitra Jateng Dalam Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah
270	Arif Sudarmono, SH	141003741010206	Kebijakan Hukum Peningkatan Pelayanan Publik Di Bidang Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal
271	Aditya Andang Permana, SH	141003741010227	Analisis Yuridis Pengadaan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Semarang - Solo)
272	Hery Widjajanto, SH	151003741010343	Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Hak Guna Usaha
273	Rosian Anwar, SH	'151003741010344	Perlindungan Hukum Petani Penggarap Terhadap Tanah Yang Telah Bersertifikat
274	Agus Supriyadi, SH	151003741010356	Efektifitas Penerapan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara
275	Bintang Yudha Daneswara, SH	151003741010357	Analisis Yuridis Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah Terhadap Kebijakan Program "Full Day School"
276	Nuke Wijayanti Kusumo, SH	151003741010360	Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Panitia Pengawas Kota Salatiga Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga
277	Tanto Gailea, SH	151003741010363	Penerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Penyusunan Dan Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Semarang
278	Hendra Himawan, SH	151003741010372	Kajian Hukum Administrasi Negara Terhadap Penerapan Sanksi Pegawai Negeri Sipil Yang Melanggar Hukum
<b>APRIL 2018</b>			
279	Fitriah, SH	151003741010358	Batas Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Memeriksa Memutus Dan Menyelesaikan Sengketa Pertanahan

280	Mukminah, SH	151003741010359	Tinjauan Yuridis Terhadap Penelitian Administrasi Oleh Panitera Terkait Lengkapnya Berkas Perkara Fiktif Positif Di Peradilan Tata Usaha Negara
281	Agung Risdiyanto, SH	161003741010412	Pelaksanaan Ganti Rugi Yang Tidak Disepakati Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol
282	Agus Rahmanto, SH	161003741010413	Kebijakan Pemerintah Dalam Mempercepat Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
283	Bagas Agung Wibowo, SE	161003741010414	Optimalisasi Pelayanan Melalui Rumah Layanan Dalam Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanahan Di Kota Semarang
284	Daniel Abdi Prasajo, S.SIT	161003741010416	Implementasi Manajemen Kendali Mutu Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Pemetaan Bidang Tanah
285	Dias Widyarto, SAB	161003741010417	Perlindungan Karyawan Kontrak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
286	Latif, S.Sos	161003741010419	Kajian Yuridis Mekanisme Perubahan Status Harta Benda Wakaf Yang Terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Batang - Semarang II Seksi V
287	Machmud Destianto, SST	161003741010421	Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Di Bidang Pertanahan Melalui Layanan Online Pada Kantor Pertanahan Kota Semarang
288	Safri Abidin Noor Haq, S.Sos	161003741010426	Kebijakan Kantor Pertanahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Di Kota Semarang
289	C. Heru Kristiawan, SH	161003741010431	Penerapan Asas Kontradiktur Dilimitasi Dan Pemasangan Tanda Batas Tanah Yang Berbatasan Terhadap Kepastian Hukum Hak Atas Tanah
290	Aliana Nashla, SST	161003741010433	Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tentang Sengketa Kepemilikan Tanah Di Kota Semarang (Studi Kasus Putusan PTUN No.049/G/2014/PTUN.SMG.)
291	Wahyu Anggraeni, SH	161003741010413	Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Kepegawaian Dalam Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Langkat (Studi Putusan Nomor 569K/TUN/2017)
292	Toro Masiran, SH	161003741010517	Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Lingkungan Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan



**OKTOBER 2018**

293	Bayu Priyanto, SH	161003741010415	Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Publik Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Di dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Semarang
294	Aniceto Magno Da Silva, S.Sos,SH	161003741010457	Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Terhadap Penanganan Pelacuran Jalanan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1956 Dan Relevansinya
295	Tenas Kisamlu, SH	161003741010484	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mempertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi
296	Diyah Wahyuningsih, SH	161003741010485	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Dalam Pelaksanaan Akses Dan Pelayanan Arsip
297	Rosman Rahman, SE, MAP	161003741010486	Efektivitas Proses Hukum Keberatan Dan Banding Pada Kantor Pengawasan Di Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas
298	Sri Arijani, SH	161003741010487	Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Terhadap Pelayanan Permohonan Pengukuran Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Semarang
299	Susasi Widyati, S. SH	161003741010488	Implementasi Perlindungan Tenaga Kerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Efisiensi Perusahaan
300	Satriya Dinda Wicaksono, Amd. IP. SH	161003741010506	Pemberian Remisi Narapidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012